

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 *Good Corporate Governance*

2.1.2.1 Pengertian *Good Corporate Governance*

Menurut Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2011 Pasal 1 ayat 1, tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Menurut Kusmayadi, Rudiana dan Badruzaman (2015:11) *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut: “*Good Corporate Governance* (GCG) adalah seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan.”

Menurut Basirudin dan Abdul (2015:4) *Good corporate governance* adalah sebagai berikut:

“*Good corporate governance* merupakan peraturan yang ditegakkan melalui lembaga internal dan eksternal yang berbeda untuk menyelesaikan konflik keagenan dan melindungi kepentingan pemegang saham organisasi di mana berguna untuk memastikan bahwa perusahaan dijalankan secara bertanggung jawab dan akuntabel yang meningkatkan kinerja secara keseluruhan.”

Menurut Handayani et al, (2024), mekanisme *Good Corporate Governanace* dibagi menjadi mekanisme eksternal dan internal perusahaan. Mekanisme eksternal dipengaruhi oleh faktor eksternal perusahaan yang meliputi investor, auditor, kreditor dan lembaga yang mengesahkan legalitas. Sedangkan mekanisme internal dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan, seperti kepemilikan manajerial, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, serta kepemilikan Instutisional dll.

Dengan adanya *Good Corporate Governance*, perusahaan dituntut untuk melakukan suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian berikut pengukuran kinerjanya. Pencapaian atas *Good Corporate Governance* tidak akan terlepas dari pengendalian internal. Pengendalian internal sangat penting bagi perusahaan dikarenakan dengan adanya pengendalian internal maka dapat mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu perusahaan agar menjadi lebih baik.

Pengendalian internal dapat mencegah kerugian atau pemborosan pengolahan sumber daya perusahaan. Selain itu pula dapat menyediakan informasi tentang bagaimana menilai kinerja perusahaan dan manajemen perusahaan serta menyediakan informasi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan yang dilakukan oleh perusahaan agar dalam proses pelaksanaannya dapat sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah terkandung dalam *Good Corporate Governance*.

2.1.2.2 Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* memiliki dimensi yang luas sehingga penerapannya disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan perusahaan yang bercirikan adanya pemisahan pemilik, pengelola dan pengendali masing-masing mengemban hak dan kewajiban (Rustendi, 2017:106).

Secara Umum KNKG (2006) yang diperkuat oleh Peraturan Menteri BUMN RI No PER-01/MBU/2011, mengemukakan bahwa *Good Corporate Governance* yang mempertimbangkan peran pemangku kepentingan dalam upaya mendukung kesinambungan bisnis perusahaan, terdiri atas prinsip-prinsip:

a. *Transparency* (Transparansi)

Transparansi adalah keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, dan pengungkapan informasi material yang relevan mengenai perusahaan.

b. *Accountability* (Pertanggungjawaban)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;

c. *Responsibility* (Tanggung Jawab)

Responsibilitas yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

d. *Independency* (Kemandirian)

Independensi yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

e. *Fairness (Keadilan)*

Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

2.1.2.3 Tujuan penerapan *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengatur dan menjalankan perusahaan secara efektif dan bertanggung jawab. Tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan para *stakeholders* lain. Tujuan utama dalam penerapan *Good Corporate Governance*, yaitu:

- 1) Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham;
- 2) Melindungi hak dan kepentingan para anggota *stakeholders* non-pemegang saham;
- 3) Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham;
- 4) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dewan pengurus atau *board of directors* dan manajemen perusahaan;
- 5) Meningkatkan mutu hubungan *board of directors* dengan manajemen senior perusahaan.

Tujuan utama dari penerapan *Good Corporate Governanace* adalah untuk melindungi kepentingan para pemegangg saham dan pihak-pihak yang terlibat

dalam pengelolaan perusahaan sehingga perusahaan dapat menjalankan aktivitasnya secara efektif dan efisien. Dengan menerapkan *Good Corporate Governance* perusahaan diharapkan dapat meningkatkan nilai saham dan kepercayaan public terhadap perusahaan.

2.1.2.4 Manfaat penerapan *Good Corporate Governance*

Manfaat dari penerapan *Good Corporate Governance* yaitu untuk meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat dan mendorong kinerja perusahaan dalam menerapkan *Good Corporate Governance*. Hal ini berarti, penerapan *Good Corporate Governance* bermanfaat untuk mengarahkan dan mengendalikan jalannya perusahaan agar menjadi ideal untuk keberhasilan usaha dan akuntabilitas usaha.

Seberapa jauh perusahaan memperhatikan prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance* telah semakin menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan investasi. Terutama hubungan antara praktik *corporate governance* dengan karakter investasi internasional saat ini. Suatu perusahaan dan atau negara yang ingin menuai manfaat dari pasar modal global, dan jika kita ingin menarik modal jangka panjang, maka penerapan *Good Corporate Governance* secara konsisten dan efektif akan mendukung ke arah itu. Bahkan jikapun perusahaan tidak bergantung pada sumber daya dan modal asing, penerapan prinsip dan praktik *Good Corporate Governance* akan dapat meningkatkan keyakinan investor domestik terhadap perusahaan. Di samping hal-hal tersebut di atas, *Good Corporate Governance* juga dapat:

- 1) Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang (*wrong-doing*), ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya hal tersebut.
- 2) Mengurangi biaya modal (*cost of capital*), yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat resiko perusahaan.
- 3) Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan tersebut kepada publik luas dalam jangka panjang.
- 4) Menciptakan dukungan para *stakeholder* (para pihak yang berkepentingan) dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam mencipta kan kemakmuran dan kesejahteraan.

2.1.2.5 Mekanisme Penerapan *Good Corporate Governance*

Mekanisme *corporate governance* terdiri dari tiga elemen penting, yaitu struktur, sistem dan proses yang digunakan oleh organ-organ dalam suatu perusahaan untuk mengarahkan dan mengendalikan operasional perusahaan agar berjalan sesuai apa yang diharapkan. Mekanisme kunci dari *corporate governance* adalah proteksi investor eksternal, baik pemegang saham maupun kreditur, melalui

sistem ilegal yang dapat diartikan dengan hukum dan pelaksanaannya. Mekanisme *corporate governance* bertujuan untuk meminimalisir konflik keagenan yang ada dalam perusahaan. Mekanisme *corporate governance* ini berfungsi untuk memberikan keyakinan bagi para investor untuk mendapatkan return atas dana yang telah di investasikan. Mekanisme *corporate governance* dalam penelitian ini diantaranya meliputi dewan komisaris, dan dewan direksi, komite audit, dan kepemilikan institusional.

2.1.2 Dewan Komisaris

Menurut Suprasto dan Haryanti (2019:223) dewan komisaris merupakan wakil *shareholder* dalam suatu perusahaan yang memegang kendali atas pengawasan manajemen yang diharapkan adil dan netral. Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Dewan komisaris merupakan inti dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Dewan komisaris diharapkan dapat menjembatani kepentingan principal sehingga dapat terwujud kinerja keuangan yang baik. Sebab dewan komisaris bertugas untuk bertindak demi kepentingan terbaik bagi perusahaan dengan menghindari kepentingan pribadi (Febrina, 2022).

Dewan komisaris memiliki peran krusial dalam pengelolaan bisnis perusahaan, termasuk tanggung jawab pengawasan umum dan khusus sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar. Tugas mereka adalah memberikan saran dan panduan kepada dewan direksi. Dewan komisaris dalam melakukan pengawasan tersebut berdasarkan pada kebijakan dan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan (Dewi & Muslih, 2018:214).

Menurut KNKG (2006: 13), dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan GCG. Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota dewan komisaris termasuk komisaris utama adalah setara. Tugas komisaris utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan dewan komisaris.

Adapun pertanggungjawaban dewan komisaris menurut KNKG (2006: 13) adalah sebagai berikut:

1. Dewan komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh Direksi. Laporan pengawasan Dewan Komisaris merupakan bagian untuk memperoleh dari laporan tahunan yang disampaikan kepada RUPS persetujuan.
2. Dengan diberikannya persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan atas laporan keuangan, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab kepada masing-masing anggota dewan komisaris sejauh hal-hal tersebut tercermin dari laporan tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing anggota dewan komisaris dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan dan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi dengan aset perusahaan.
3. Pertanggungjawaban dewan komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan asas GCG.

Sembiring (2005:382) menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. Semakin banyak anggota dewan komisaris, semakin besar pula tekanan pada manajemen untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan. Berdasarkan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 Pasal 20, jumlah anggota Dewan Komisaris dalam perusahaan publik sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang, dan jika hanya terdapat dua orang, maka salah satunya wajib merupakan Komisaris Independen. Ukuran dewan komisaris dalam penelitian ini dilihat dari banyaknya anggota jumlah dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Rumus Ukuran Dewan Komisaris (Fahrizqi, 2010) :

$$\text{Ukuran Dewan Komisaris} = \sum \text{Anggota Dewan Komisaris}$$

2.1.3 Dewan Direksi

2.1.3.1 Pengertian Dewan Direksi

Dewan direksi adalah sekelompok individu yang dipilih melalui pemegang saham perusahaan dengan tujuan untuk mewakili kepentingan perusahaan dan memastikan bahwa manajemen bertindak atas nama mereka. Menurut Khaoula & Moez (2019) dewan direksi memiliki tanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya, meningkatkan kinerja perusahaan dan meningkatkan kekayaan pemegang saham. Menurut Effendi (2016) definisi dewan direksi adalah sekelompok individu yang dipilih untuk bertindak sebagai perwakilan para pemegang saham untuk membangun aturan yang terkait dengan manajemen perusahaan dan membuat keputusan penting perusahaan. Berdasarkan POJK No.

33/POJK.04/2014 Pasal 2 ayat (1), disebutkan bahwa jumlah minimal anggota direksi dalam suatu perusahaan publik adalah dua orang. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan fungsi manajerial dalam perusahaan terbuka serta untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

2.1.3.2 Prinsip-prinsip Dewan Direksi

Menurut Kusmayadi et al. (2015) agar pelaksanaan tugas direksi dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut:

- a. Komposisi direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
- b. Direksi harus profesional yaitu berintegritas dan memiliki pengalaman serta kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.
- c. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan (*probability*) dan memastikan kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan.
- d. Direksi mempertanggung jawabkan kepengurusan dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3.3 Fungsi Dewan Direksi

Menurut Kusmayadi et al. (2015) fungsi pengelolaan perusahaan oleh dewan direksi mencakup 5 (lima) tugas utama yaitu:

1. Kepengurusan

- a. Direksi harus menyusun visi, misi, dan nilai-nilai serta program jangka panjang dan jangka pendek perusahaan untuk dibicarakan dan disetujui oleh dewan komisaris atau RUPS sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- b. Direksi harus dapat mengendalikan sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan secara efektif dan efisien.
- c. Direksi harus memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan.
- d. Direksi dapat memberikan kuasa kepada komite yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugasnya atau kepada karyawan perusahaan untuk melaksanakan tugas tertentu, namun tanggung jawab tetap berada pada direksi.
- e. Direksi harus memiliki tata tertib dan pedoman kerja (*charter*) sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja.

2. Manajemen Risiko

- a. Direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem manajemen risiko perusahaan yang mencakup seluruh aspek kegiatan perusahaan.
- b. Untuk setiap pengambilan keputusan strategis, termasuk penciptaan produk atau jasa baru, harus diperhitungkan dengan seksama dampak risikonya, dalam arti adanya keseimbangan antara hasil dan beban risiko.

- c. Untuk memastikan dilaksanakannya manajemen risiko dengan baik, perusahaan perlu memiliki unit kerja atau tanggung jawab terhadap pengendalian risiko.

3. Pengendalian Internal

- a. Direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian internal perusahaan yang handal dalam rangka menjaga kekayaan dan kinerja perusahaan serta memenuhi peraturan perundangundangan.
- b. Perusahaan yang sahamnya tercatat dibursa efek, perusahaan Negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, harus memiliki satuan kerja pengawas internal.
- c. Satuan kerja atau fungsi pengawasan internal bertugas membantu direksi dalam memastikan pencapaian tujuan dan kelangsungan usaha dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program perusahaan, memberikan saran dalam upaya memperbaiki efektivitas proses pengendalian risiko, melakukan evaluasi kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan internal, pelaksanaan GCG dan perundang-undangan dan memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh auditor eksternal.

4. Komunikasi

- a. Direksi harus memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan dengan memberdayakan fungsi sekretaris perusahaan.

- b. Fungsi sekretaris perusahaan adalah memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan dan menjamin tersedianya informasi yang boleh diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan wajar dari pemangku kepentingan.
- c. Dalam hal perusahaan tidak memiliki satuan kerja kepatuhan (*compliance*) tersendiri, fungsi untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan oleh sekretaris perusahaan.
- d. Sekretaris perusahaan atau pelaksana fungsi sekretaris perusahaan bertanggung jawab kepada direksi. Laporan pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan disampaikan pula kepada dewan komisaris.

5. Tanggung Jawab Sosial

Memperoleh pengakuan dari masyarakat atas keberadaan perusahaan, maka direksi harus memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dalam rangka mempertahankan kesinambungan usaha perusahaan, direksi dapat memastikan dipenuhinya tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*), direksi juga harus mempunyai perencanaan tertulis yang jelas dan fokus dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

2.1.3.1 Pertanggung Jawaban Dewan Direksi

Diakhir periode, direksi harus melaporkan pertanggung jawaban. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa seperti dibawah ini:

- a) Direksi harus menyusun pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan dalam bentuk laporan tahunan yang memuat antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan perusahaan, dan laporan pelaksanaan GCG.

- b) Laporan tahunan harus memperoleh persetujuan RUPS, dan khusus untuk laporan keuangan harus memperoleh pengesahan RUPS.
- c) Laporan tahunan harus telah tersedia sebelum RUPS diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memungkinkan pemegang saham melakukan penilaian.
- d) Dengan diberikannya persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan atas laporan keuangan, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab.

2.1.3.1 Metode Pengukuran Dewan Direksi

Menurut Rohmansyah (2017) Dewan direksi dapat diukur dengan menggunakan:

$$\text{Dewan Direksi} = \sum \text{Jumlah Anggota Dewan Direksi}$$

2.1.4 Komite Audit

2.1.4.1 Pengertian Komite Audit

Menurut Husaini (2009: 11) Komite Audit adalah suatu badan atau komite yang dibentuk oleh jajaran dewan komisaris untuk membantu melakukan pengecekan, pemeriksaan, dan penelitian yang dianggap penting terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jajaran direksi dalam pengelolaan perusahaan.

Peraturan Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Pasal (1) komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

Komite audit bertindak sebagai “mata” dan “telinga” dewan komisaris, yang berarti komite audit memberikan informasi, saran, dan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai kinerja, risiko, kepatuhan, dan kualitas laporan keuangan perusahaan. Komite audit yang efektif adalah komite audit yang memiliki anggota yang independen, kompeten, dan profesional, serta mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik (Husaini, 2009: 11). Komite audit memberikan masukan kepada dewan komisaris tentang berbagai aspek laporan keuangan perusahaan. Komite audit yang baik harus memiliki anggota yang independen, kompeten, dan profesional.

2.1.4.1 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, struktur pengendalian intern dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan manajemen (Husaini, 2009: 12).

POJK Nomor 55/POJK.04/2015 Pasal (10) Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;

2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiter atau Perusahaan Publik; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

2.1.4.2 Audit Internal

Menurut *International Professional Practices Framework* (IPPF), audit internal adalah aktivitas konsultasi dan penjaminan yang independen dan objektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Bertujuan untuk membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menerapkan

pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola.

Auditor memeriksa informasi yang mendukung laporan keuangan untuk memberikan opini auditor formal. Opini ini ditempelkan di bagian depan laporan keuangan organisasi untuk menunjukkan apakah laporan tersebut memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum dan telah diperiksa oleh auditor independen.

1. Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 terdapat 4 jenis opini audit, mencakup:

Opini Wajar tanpa Pengecualian, menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2. Opini Wajar dengan Pengecualian, menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

3. Opini Tidak Wajar, menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

4. Opini Tidak Menyatakan Pendapat (*Disclaimer*), menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

2.1.4.3 Metode Pengukuran Komite Audit

Menurut Hasibuan (2022), komite audit dapat diukur dengan:

$$\text{Komite Audit} = \text{Jumlah Anggota Komite Audit di Perusahaan}$$

Berdasarkan POJK No. 55/POJK.04/2015 Pasal 4, jumlah minimal anggota komite audit adalah tiga orang, yang terdiri dari satu Komisaris Independen sebagai Ketua dan dua anggota independen lainnya dari luar perusahaan. Ketentuan ini ditetapkan untuk memperkuat pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan dan tata kelola perusahaan.

2.1.5 Kepemilikan Institusional

2.1.5.1 Pengertian Kepemilikan Institusional

Struktur kepemilikan mencakup berbagai pola dan bentuk kepemilikan yang ada dalam sebuah perusahaan, termasuk persentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham internal dan eksternal. Pemegang saham internal adalah individu yang memiliki saham dan terlibat dalam struktur organisasi perusahaan, sedangkan pemegang saham eksternal adalah pemilik saham dari pihak luar perusahaan yang tidak tergabung dalam struktur organisasi perusahaan tersebut (Robertus, 2016:69)

Hery (2017:23) Menyatakan bahwa Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh institusi seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, reksa dana, dan institusi lainnya. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengawasi dan mendisiplinkan manajer sehingga dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. (Sudarno et al, 2022:116).

Tamrin dan Maddatuang (2019: 72) mendefinisikan kepemilikan institusional sebagai persentase saham yang dimiliki oleh institusi seperti perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, maupun perusahaan lain. Bentuk distribusi saham di antara pemegang saham dari luar salah satunya adalah kepemilikan institusional

Menurut Aprilia & Riharjo (2022) Kepemilikan saham institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi lain atau lembaga lain seperti bank, perusahaan asuransi, dan perusahaan institusi lain. Sedangkan menurut Astuti et al, (2018) Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi seperti LSM, perusahaan swasta, perusahaan efek, dana pensiun, perusahaan asuransi, bank dan perusahaan investasi.

2.1.5.2 Fungsi Kepemilikan Institusional

Menurut Christine A. Mallin, (2020) Kepemilikan manajerial memiliki beberapa fungsi dalam pengelolaan perusahaan. Beberapa di antaranya adalah :

1) Pengawasan dan Pengaruh

Investor institusional memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan manajemen dan tata kelola perusahaan melalui hak suara dan tekanan pasar.

2) Peningkatan Transparansi

Kepemilikan institusional seringkali mendorong perusahaan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, karena investor ini menuntut informasi yang lebih baik dan lebih terperinci.

3) Manajemen Risiko

Kepemilikan institusional dapat membantu dalam mengelola risiko perusahaan dengan memastikan praktik-praktik tata kelola yang baik dan stabilitas jangka panjang.

4) Peningkatan Nilai Perusahaan

Dengan menyelaraskan kepentingan manajer dan pemegang saham, kepemilikan manajerial dapat mengurangi biaya keagenan yang terkait dengan oportunisme dan kelalaian manajerial.

2.1.5.3 Pengawasan Kepemilikan Institusional

Subagyo et al (2018: 46) menyatakan bahwa Kepemilikan institusional tergolong pada struktur kepemilikan, dimana struktur kepemilikan dipercaya memiliki kemampuan untuk memengaruhi jalannya perusahaan yang nantinya dapat memengaruhi kinerja suatu perusahaan, sebab struktur kepemilikan dalam suatu perusahaan akan memiliki motivasi yang berbeda dalam hal mengawasi atau memonitor perusahaan serta manajemen dan dewan direksinya.

Menurut Pozen (1994) Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, sehingga dapat menghalangi perilaku manajer yang mementingkan kepentingannya sendiri yang pada akhirnya akan merugikan pemilik perusahaan. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan untuk

mengoptimalkan nilai perusahaan. Keberadaan investor institusional ini dipandang mampu menjadi alat monitoring efektif bagi perusahaan. Tidak jarang kegiatan investor ini mampu meningkatkan nilai perusahaan.

Tamrin dan Maddatuang, (2019:72-74) Berpendapat bahwa Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh investor institusional sehingga dapat mengurangi perilaku *opportunistic behavior* manajer. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam memonitor kinerja manajemen, karena semakin besar kepemilikan institusional mengakibatkan adanya efisiensi dalam penggunaan aktiva perusahaan. Dengan begitu dapat mengurangi pemborosan yang dilakukan oleh manajer dalam menjalankan tugasnya.

Runtu et al., (2019) mengungkapkan bahwa institusi yang memiliki bagian atas saham sebuah perusahaan yang disebut dengan kepemilikan institusional memiliki tanggung jawab agar bisa menjadi pengarah dan pertahanan yang bagus ketika manajer menentukan keputusan. Institusi yang memiliki saham mayoritas diyakini mampu memberikan pengendalian kepada manajemen dalam kebijakan keuangan perusahaan. Akan mendorong kinerja yang lebih optimal.

Kepemilikan institusional akan mengubah pengelolaan perusahaan yang awalnya berjalan sesuai keinginan pribadi menjadi perusahaan yang berjalan sesuai pengawasan (Dwiyani, 2017). Pengawasan yang efektif dari pihak institusi menjadikan pihak manajemen termotivasi untuk bekerja lebih baik dalam menunjukkan kinerjanya. Kepemilikan institusional dimungkinkan dapat

meningkatkan untuk segera melaporkan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dari peraturan yang telah ditetapkan (Hamida, 2015).

Kepemilikan institusional dinilai memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba (Jensen dan Meckling, 1976).

2.1.5.4 Pengukuran Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengawasi dan mendisiplinkan manajer sehingga dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen (Sudarno et al, 2022:116). Kepemilikan institusional diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki institusi lain di luar perusahaan minimal 10% terhadap total saham perusahaan (Satria dan Widyawati, 2023)

Menurut Sudarno et al, (2022:116) kepemilikan Institusional dapat diukur dengan cara sebagai berikut.

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki Institusi}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} 100\%$$

2.1.6 Kinerja Keuangan

2.1.2.1 Definisi Kinerja Keuangan

Menurut Rahayu (2020:7) mendefinisikan kinerja keuangan adalah keberhasilan, prestasi atau kemampuan kerja perusahaan dalam rangka penciptaan nilai bagi perusahaan atau pemilik modal dengan cara-cara yang efektif dan efisien.

Menurut Hery, (2016:25) pengukuran kinerja keuangan merupakan suatu usaha formal untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dan posisi kas tertentu. Dengan pengukuran kinerja keuangan dapat dilihat prospek pertumbuhan dan perkembangan keuangan perusahaan dari mengandalkan sumber daya yang dimilikinya. Perusahaan dikatakan berhasil jika perusahaan telah mencapai suatu kinerja tertentu yang telah diterapkan.

Menurut Hermawan dan Toni, (2021:33) kinerja keuangan merupakan suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi yang telah dilaksanakan pada periode waktu tertentu yang dapat mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga dapat melihat prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan perusahaan dengan mengandalkan sumber daya yang ada.

Pramanaswari, (2024) menyatakan bahwa kinerja keuangan sebuah perusahaan mencerminkan kemampuannya dalam mengelola sumber daya dan operasionalnya secara efisien untuk menghasilkan laba dan nilai tambah bagi para pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya.

2.1.2.2 Tujuan Kinerja Keuangan

Menurut Hutabarat, (2020:3) ada 4 (empat) tujuan dilaksanakannya penilaian kinerja keuangan suatu perusahaan yaitu:

1. Untuk mengetahui profitabilitas atau rentabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
2. Untuk mengetahui likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi.
3. Untuk mengetahui solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang.
4. Untuk mengetahui stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil.

2.1.2.3 Pengukuran Kinerja Keuangan

Putri dan Munfaqiroh, (2020) memberikan penjelasan mengenai analisis rasio keuangan, bahwa:

“Analisis rasio keuangan adalah teknik analisis penggabungan antara satu unsur dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan, yang dinyatakan dalam bentuk matematis yang sederhana dalam periode atau kurun waktu tertentu. Dengan cara membandingkan dua buah variabel yang diambil dari laporan keuangan perusahaan, baik daftar neraca maupun laba rugi ataupun hasil-hasil usaha dan suatu perusahaan pada periode tertentu yang dapat dimanfaatkan sebagai alat ukur kondisi keuangan suatu perusahaan”.

Analisis rasio yaitu teknik analisis yang bertujuan untuk dapat mengetahui hubungan antar pos tertentu dari segi neraca maupun laba rugi (Sari, 2020: 22).

Pengukuran Kinerja keuangan dalam hal ini menggunakan satu rasio yaitu rasio profitabilitas. Menurut Hery (2016:193) jenis-jenis profitabilitas yang dapat digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba adalah:

1) Hasil Pengembalian atas Aset (*Return on Assets*)

Merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total aset. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung hasil pengembalian atas aset:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2) Hasil Pengembalian atas Ekuitas (*Return on Equity*)

Merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap ekuitas. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung hasil pengembalian atas ekuitas:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

3) Marjin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba kotor terhadap penjualan bersih. Laba kotor sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara penjualan bersih dengan harga pokok penjualan. Yang dimaksud dengan penjualan bersih disini adalah penjualan (tunai maupun kredit) dikurangi retur dan penyesuaian harga jual serta potongan penjualan. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung marjin laba kotor:

$$\text{Marjin Laba Kotor} = \frac{\text{Penjualan Bersih} - \text{HPP}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

4) Marjin Laba Operasional (*Operating Profit Margin*)

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba operasional atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba operasional terhadap penjualan bersih. Laba operasional sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba kotor dengan beban operasional. Beban operasional disini terdiri atas beban penjualan maupun beban umum dan administrasi. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung marjin laba operasional:

$$\text{OPM} = \frac{\text{Laba Operasional}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\%$$

5) Marjin Laba Bersih (*Operating Profit Margin*)

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba bersih atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap penjualan bersih. Laba bersih sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba sebelum pajak penghasilan dengan beban pajak penghasilan. Yang dimaksud dengan laba sebelum pajak penghasilan di sini adalah laba operasional ditambah pendapatan dan keuntungan lain-lain, dikurangi dengan beban dan kerugian lain-lain. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung marjin laba bersih:

$$NP = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\%$$

Berdasarkan penjelasan mengenai rasio diatas, penulis memutuskan untuk menggunakan indikator *return on assets* dalam pengukuran Profitabilitas. Menurut Kasmir (2018:203) standar industri untuk *Return on Assets* (ROA) adalah 30%. Penulis menggunakan Indikator tersebut karena dapat memberikan informasi tentang efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba, serta mencerminkan kemampuan perusahaan dalam meraih laba dari aset yang dimilikinya.

2.1.7 Teori Agensi

Teori yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling, (1976) menjelaskan hubungan keagenan sebagai “*agency relationship as a contract under which one or more person (the principals) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent*”.

Teori keagenan mendeskripsikan pemegang saham sebagai principal dan manajemen sebagai agen. Principale merupakan pemegang saham, sedangkan agent merupakan manajemen perusahaan yang mengelola perusahaan. Manajemen merupakan pihak yang di kontrak oleh pemegang saham. Untuk itu manajemen di berikan sebagian kekuasaan untuk membuat keputusan bagi kepentingan terbaik pemegang saham. Oleh karena itu, manajemen wajib mempertanggungjawabkan semua uoayanya kepada pemegang saham. Teori ini berhubungan dengan *Good Corporate Governance* karena menyoroti hubungan langsung anatar *principal* (Widiastari, 2023). Supriyono, (2018:63) konsep teori keagenan merupakan hubungan kontraktual antara principal dan agen dimana principal memberi wewenang kepada agen terkait pembuatan keputusan terbaik bagi principal dengan mengutamakan kepentingan dalam memperoleh keuntungan bagi principal.

Menurut Pramanaswari, (2024) Teori Keagenan (*Agency Theory*) adalah salah satu teori yang mendasari studi tentang tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) dan hubungan manajer (*agent*) dan pemegang saham (*principal*). Teori ini menjelaskan bagaimana hubungan kontraktual antara

principal dan agen sering kali dipenuhi dengan konflik kepentingan, di mana agen mungkin tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik principal.

Agency problems sering kali timbul karena principal dan agen memiliki motivasi yang berbeda. Principal memiliki motivasi untuk memastikan bahwa investasinya menghasilkan keuntungan yang optimal, sementara agen cenderung memaksimalkan keuntungan dan kebutuhan ekonominya sendiri. Misalnya, principal ingin agar perusahaan menghasilkan laba yang tinggi untuk meningkatkan nilai saham, sementara agen mungkin lebih fokus pada pengembangan karir pribadinya atau mendapatkan bonus yang besar.

Teori agensi hadir untuk mengatasi masalah ini dengan menetapkan kerangka kerja yang mengatur hubungan antara principal dan agen. Tujuannya adalah untuk menciptakan insentif yang sejalan antara kedua belah pihak, sehingga agen termotivasi untuk bertindak sesuai dengan kepentingan principal. Melalui mekanisme seperti kontrak kerja, insentif finansial, pengawasan, dan transparansi, teori agensi berusaha untuk mengurangi tindakan agen yang tidak sesuai dengan kepentingan principal

2.1.8 Kajian Empiris

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Pada penelitian ini penulis menyimpulkan referensi dari beberapa jurnal penelitian terdahulu sebagai acuan untuk mempermudah proses penelitian, antara lain:

1. Nugroho, S., & Jayanti, F, (2024) “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *gender diversity*, dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, *age diversity* dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, ukuran dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, frekuensi rapat dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.
2. Lestari et al., (2024) “Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Profitabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan dengan Kebijakan Dividen sebagai Variabel Pemoderasi pada Perusahaan Sektor Perbankan di Bursa Efek Indonesia”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Proksi *Good Corporate Governance*, yakni kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan (2) Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan (3) Kebijakan dividen tidak dapat memoderasi pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan (4) Kebijakan dividen tidak dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap kinerja keuangan perusahaan.
3. Pitaloka dan Hartono, (2024) “Pengaruh *Good Corporate Governance*, leverage, dan firm size terhadap kinerja keuangan pada perusahaan sektor mining yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Kinerja keuangan pada perusahaan sektor mining yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 –2022 dipengaruhi

oleh *board size*, *leverage* dan *firm size*. Ketiga variabel tersebut berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. *Good corporate governance* (GCG) yang diproksikan oleh *board independence* dan *audit committee* tidak berpengaruh pada kinerja keuangan perusahaan.

4. Febrina, (2022) “Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan”. Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Komisaris dan Komite Audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sedangkan Dewan Direksi dan Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
5. Pramanaswari, (2024) “Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI Tahun 2020-2023”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *good corporate governance*, yang terdiri dari kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional, memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Temuan ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya struktur kepemilikan dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan perusahaan, serta implikasinya terhadap kinerja keuangan.
6. Wahyuningtiasari dan Sulastiningsih, (2024) “Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Indeks IDX30”. Melakukan penelitian mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* yang diimplementasikan menggunakan Dewan Komisaris, Dewan Direksi,

dan Komite Audit serta Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan Indeks IDX yang terdaftar di BEI periode 2020-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Komisaris, Komite Audit sebagai proksi *Good Corporate Governance* mempengaruhi signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Sedangkan Dewan Direksi sebagai proksi *Good Corporate Governance* tidak mempengaruhi Nilai Perusahaan secara signifikan.

7. Suryati, (2020) “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Kualitas Laba dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *good corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba, serta ukuran perusahaan mampu memperkuat *good corporate governance* terhadap kualitas laba, yang berarti bahwa semakin tinggi nilai *good corporate governance* pada perusahaan yang berukuran besar maka akan semakin tinggi pula kualitas laba perusahaan, jadi ukuran perusahaan mampu memperkuat pengaruh *good corporate governance* terhadap kualitas laba.
8. Siti Nuridah et al., (2023) “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Profitabilitas”. Melakukan penelitian mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* yang diimplementasikan menggunakan Komite Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional terhadap Profitabilitas pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit

tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Kemudian komite audit, komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas.

9. Ariedina dan Liana, (2023) “Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Modal Intelektual”. Melakukan penelitian mengenai pengaruh variabel-variabel independent yaitu proporsi komisaris independent, ukuran dewan direksi, frekuensi pertemuan komite audit, ukuran komite audit dan profitabilitas terhadap variabel dependen pengungkapan modal intelektual pada perusahaan manufaktur. Hasil pada penelitian ini menyimpulkan bahwa ukuran dewan direksi dan ukuran komite audit memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap pengungkapan modal intelektual, sedangkan proporsi komisaris independen, frekuensi pertemuan komite audit dan profitabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual.
10. Wijayanti dan Mawarni, (2023) “Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Profitabilitas dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Moderasi” melakukan penelitian mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* menggunakan Kepemilikan Manajerial, kepemilikan institusional dan dewan komisaris independent terhadap profitabilitas dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen secara signifikan

berpengaruh terhadap variabel profitabilitas, sedangkan pengaruh variabel kepemilikan manajerial terhadap profitabilitas tidak signifikan, pengaruh kualitas audit terhadap profitabilitas juga tidak signifikan, kualitas audit tidak mampu memoderasi pengaruh variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen terhadap Profitabilitas. Implikasi dari penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi strategi bagi perusahaan dalam meningkatkan profitabilitas.

11. Anggraeni dan Krisnawati, (2023) “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap profitabilitas Dan Nilai Perusahaan (Studi Kasus Pada Sub Sektor Pertanian Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia 2017-2021)”. Melakukan penelitian mengenai keterkaitan *Good Corporate Governance* dengan perusahaan sub sektor pertanian di BEI tahun 2017-2021. Penelitian ini menggunakan variabel pada proksi *Good Corporate Governance* terhadap Profitabilitas dan Nilai Perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap empat variabel yang mewakili *Good Corporate Governance*, Kinerja Keuangan, dan Nilai Perusahaan.
12. Zahidah, dan Aris (2024) “Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Perusahaan LQ45 yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2022). Melakukan penelitian mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Leverage* terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap variabel kinerja keuangan pada perusahaan

LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022. Variabel dewan direksi berpengaruh terhadap variabel kinerja keuangan pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022. Variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap variabel kinerja keuangan pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022. Variabel dewan komisaris⁴⁷ berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022. Variabel kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap variabel kinerja keuangan pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022. Variabel *leverage* berpengaruh terhadap variabel kinerja keuangan pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022.

13. Asyati dan Farida, (2020) “Pengaruh *Good Corporate Governance*, Leverage, Profitabilitas dan Kualitas Audit terhadap Praktik Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2018)”. Melakukan penelitian mengenai pengaruh tata kelola yang baik, leverage, profitabilitas, dan kualitas audit terhadap praktik manajemen laba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *good corporate governance* yang terdiri dari dewan komisaris independen, komite audit dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba sedangkan dewan komisaris dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba. Variabel leverage tidak berpengaruh pada manajemen laba. Variabel profitabilitas yang diukur

dengan ROA memiliki efek positif dan kualitas audit tidak berpengaruh pada manajemen laba.

14. Swarly dan Wibowo, (2022) “Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan Profitabilitas Terhadap Harga Saham”. Melakukan penelitian tata kelola perusahaan dan profitabilitas terhadap Harga saham. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham sedangkan Profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham.
15. Medianto et al., (2022) “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2014-2020)”. Melakukan penelitian mengenai *Good Corporate Governance*, Komite Audit, Dewan Direksi, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional terhadap Profitabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Komite Audit, Dewan Direksi, Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Return on Equity secara parsial. Komite Audit, Dewan Direksi, Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Return on Equity secara simultan.
16. Azmy et al., (2019) “*Effect of Good Corporate Governance on Company Profitability RE & Property Sector In Indonesia*”. Melakukan penelitian mengenai pengaruh *Good Corporate Governance*, Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Komite Audit terhadap Profitabilitas perusahaan. Hasil

dari penelitian menunjukkan bahwa Dewan Direksi dan Komite Audit berpengaruh positif signifikan terhadap *Return on Assets* dan *Return on Equity*. Sedangkan Dewan Komisaris tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA dan ROE.

17. Rizki dan Wuryani (2021) “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2014-2018”. Melakukan penelitian mengani pengaruh penerapa *Good Corporate Governance*, Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, Kualitas Audit Eksternal dan Kepemilikan Intitusional terhadap Kinerja Perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan direksi dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh pada kinerja keuangan, sedangkan dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit eksternal tidak memiliki pengaruh pada kinerja keuangan.
18. Margaret dan Daljono, (2023) “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021)”. Melakukan Penelitian mengenai pengaruh *Good Corporate governance*, dewan komisaris independent, dewan direksi, komite audit, kepemilikan manajeraial, kepemilikan institusional dan kepemilikan pemerintah terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan direksi dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *Return on Assets*. Sedangkan dewan komisaris independen, komite audit,

kepemilikan manajerial dan kepemilikan pemerintah berpengaruh negative terhadap *return on assets*.

19. Anandamaya dan Hermanto (2021) “Pengaruh *Good Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan Dan Laverage Terhadap Kinerja Keuangan”. Melakukan Penelitian mengenai pengaruh *Good Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan pada perusahaan infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi periode tahun 2017-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, variabel komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan serta variabel leverage berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.
20. Yuliyanti dan Cahyonowati, (2023) “Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan”. Melakukan penelitian tentang pengaruh Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional tidak di temukan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan.

Tabel 2. 1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Peneliti, Tahun,Tempat Penelitian dan Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nugroho et al., (2024) “Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI”	• Variabel Dewan Komisaris dan Dewan Direksi • Variabel Kinerja Keuangan	X: • Variabel <i>Gender diversity, diversity.</i> Y: • Tempat Penelitian • Periode Penelitian	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa <i>gender diversity</i> , dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, <i>age diversity</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, frekuensi rapat dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.	Dinamika akuntansi keuangan dan perbankan,V ol.3,No.1,Ha l: 09–22; Mei 2024,ISSN: 2656-4955
2	Lestari et al., (2024). “Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan Profitabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan dengan Kebijakan Dividen sebagai Variabel Pemoderasi pada Perusahaan Sektor Perbankan di Bursa Efek Indonesia”.	• Variabel Kepemilikan Institusional • Variabel Kinerja Keuangan	X: • Variabel Profitabilitas Y: • Variabel Kebijakan Dividen • Analisis regresi moderasi • Tempat Penelitian • Periode Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Proksi <i>Good Corporate Governance</i> , yakni kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan (2) Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. (3) Kebijakan dividen tidak dapat memoderasi pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap kinerja keuangan perusahaan (4) Kebijakan dividen tidak dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap kinerja keuangan perusahaan.	Jurnal Economina Volume 3, Nomor 2, Februari 2024 e-ISSN: 2963-1181
3	Pitaloka dan Hartono, (2024) “Pengaruh <i>good</i>	• Variabel Komite Audit	X: • Variabel <i>Board Size</i> ,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja	Jurnal ilmu manajemen

	<i>corporate governance, leverage dan firm size terhadap kinerja keuangan pada perusahaan sektor mining yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2019–2022</i>	• Variabel Kinerja Keuangan (ROA)	Y:	• <i>board Independen Leverage, dan firm size</i> • Tempat Penelitian • Periode Penelitian	keuangan pada perusahaan sektor mining yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 –2022 dipengaruhi oleh <i>board size, leverage dan firm size</i> . Ketiga variabel tersebut berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. <i>Good corporate governance</i> yang diproksikan oleh <i>board independence</i> dan <i>audit committee</i> tidak berpengaruh pada kinerja keuangan perusahaan.	Volume12N omor 3Halaman63 6-649
4	Febrina, (2022) “Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan” pada perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di BEI	• Variabel Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, • Variabel Dependen: Kinerja Keuangan	X	• Variabel Kepemilikan Manajerial • Tempat penelitian • Periode penelitian • Analisis Regresi Berganda	Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Komisaris dan Komite Audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sedangkan Dewan Direksi dan Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.	Jurnal Informasi Akuntansi, Vol.1 No.1, Juni 2022
5	Pramanaswari, (2024) “Analisis <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2023	• Variabel Kepemilikan Institusional • Variabel Kinerja keuangan • Periode Penelitian	X: Y:	• Variabel Kepemilikan Manajerial • Tempat Penelitian • Analisis regresi berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>good corporate governance</i> , yang terdiri dari kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional, memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Temuan ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya struktur kepemilikan dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan perusahaan, serta implikasinya terhadap kinerja keuangan.	Journal Economia Volume 3, Nomor 6, Juni 2024 e-ISSN: 2963-1181
6	Wahyuningtiasari, D., & Sulastiningsih, S. (2024). “Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Dan	• Variabel X: Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit	X: Y:	• Variabel Profitabilitas • Variabel Nilai Perusahaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Komisaris, Komite Audit sebagai proksi GCG mempengaruhi signifikan	Jurnal STEI Semarang, VOL16No 2EdisiJuni 2024ISSN:2

	Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Indeks IDX30".		• Tempat Penelitian • Periode Penelitian	terhadap Nilai Perusahaan. Sedangkan Dewan Direksi sebagai proksi GCG tidak mempengaruhi Nilai Perusahaan secara signifikan.	085-5656, e-ISSN:2252-7826
7	Suryati, (2020)' "Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kualitas Laba dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi pada perusahaan CGPI yang terdaftar BEI	• Penerapan GCG	• Variabel X • Variabel Y: Kualitas Laba • Variabel Z: Ukuran Perusahaan • Tempat Penelitian • Periode Penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>good corporate governance</i> berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba, serta ukuran perusahaan mampu memperkuat <i>good corporate governance</i> terhadap kualitas laba, yang berarti bahwa semakin tinggi nilai <i>good corporate governance</i> pada perusahaan yang berukuran besar maka akan semakin tinggi pula kualitas laba perusahaan, jadi ukuran perusahaan mampu memperkuat pengaruh <i>good corporate governance</i> terhadap kualitas laba.	Jurnal Kajian Ilmiah (JKI)e-ISSN: 2597-792X, ISSN:1410-9794Vol. 20No.3
8	Siti Nuridah, Merliyana Merliyana, Elda Sagitarius, & Selfa Novita Surachman. (2023) "Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Profitabilitas".Perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di BEI	• Variabel X: Komite Audit dan Kepemilikan Institusional	• Variabel X: Komisaris Independen, • Variabel Y: Profitabilitas • Tempat Penelitian • Periode Penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Kemudian komite audit, komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas.	Jurnal Ekonomi,Bisnis, dan Manajemen, Vol.2, No.2 Juni 2023 e-ISSN: 2962-7621; p-ISSN: 2962-763X, Hal 01-10
9	Ariedina, & Liana, S. (2023) "Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Dan	• Variabel X: Dewan direksi,	• Variabel X: Komisaris Independen,	Hasil pada penelitian ini menyimpulkan bahwa ukuran dewan direksi dan ukuran komite audit	Jurnal Multiparadigma Akuntansi,V

	Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Modal Intelektual”. Pada Perusahaan Mnaufaktur yang terdaftar di BEI	Komite Audit		• Variabel Modal Intelektual • Tempat Penelitian • Priode Penelitian	Y:	memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap pengungkapan modal intelektual, sedangkan proporsi komisaris indepen, frekuensi pertemuan komite audit dan profitabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual.	ol. V No,3 2023
10	Wijayanti, A., Gea, O. O., & Mawarni, R. (2023) “ <i>Pengaruh Good Corporate Governance</i> terhadap Profitabilitas dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Moderasi” perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	• Variabel Dewan Komisaris, dan Kepemilikan Institusional	X:	• Variabel Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen • Variabel Profitabilitas • Variabel Kualitas Audit • Tempat Penelitan • Periode penelitian	X: 		

12	Zahidah, D. A. ., & Aris, M. A. . (2024). Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Dan <i>Leverage</i> Terhadap Kinerja Keuangan : Studi Pada Perusahaan LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	• Variabel X: Komite Audit, Dewan Direksi, Kepemilikan Institusional • Variabel Y: Kinerja Keuangan	• Variabel X: Kepemilikan Manajerial, Dewan komisaris independent, <i>Leverage</i> • Tempat Penelitian • Periode Penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap variabel kinerja keuangan pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022. Variabel dewan direksi berpengaruh terhadap variabel kinerja keuangan pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022. Variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap variabel kinerja keuangan pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022. Variabel dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022. Variabel kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap variabel kinerja keuangan pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022. Variabel <i>leverage</i> berpengaruh terhadap variabel kinerja keuangan pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022.	Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi, 5 (1), 311-328. https://doi.org/10.46306/rev.v5i1.427
13	Asyati, S., & Farida, F. (2020). “Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , <i>Leverage</i> , Profitabilitas dan Kualitas Audit terhadap Praktik Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan	• Variabel X: Komite Audit, Kepemilikan Institusional	• Variabel X: Leverage, kualitas Audit dan kepemilikan manajerial • Variabel Y: Manajemen laba	variabel <i>good corporate governance</i> yang terdiri dari dewan komisaris independen, komite audit dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba sedangkan dewan komisaris dan	Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech)

	Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2018)".	• Tempat Penelitian • Periode Penelitian			kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba. Variabel leverage tidak berpengaruh pada manajemen laba. Variabel profitabilitas yang diukur dengan ROA memiliki efek positif dan kualitas audit tidak berpengaruh pada manajemen laba.	Vol. 3, No. 1, Februari 2020 p-ISSN: 2622-8394 e-ISSN : 2622-8122
14	Swarly, R., & Wibowo, D. H. (2022). "Pengaruh Good Corporate Governance Dan Profitabilitas Terhadap Harga Saham". Perusahaan manufaktur subsektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di BEI	• Penerapan Good Corporate Governance	• Variabel Profitabilitas • Variabel Harga saham • Tempat Penelitian • Periode penelitian	X: Y:	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Good Corporate Governance tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham sedangkan Profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham.	Jurnal Akuntansi Terapan Vol 3, No. 2, April 2022, E ISSN 2715-1212
15	Medianto et al., (2022) "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2014-2020)".	• Variabel X: Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit dan Kepemilikan Institusional	• Variabel Komisaris Independen • Variabel Y: Profitabilitas • Tempat Penelitian • Periode penelitian	X:	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Komite Audit, Dewan Direksi, Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Return on Equity secara parsial. Komite Audit, Dewan Direksi, Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Return on Equity secara simultan.	Jurnal Ekonomi dan Manajem Vol.2, No.3 September 2022 e-ISSN: 2962-4010; p-ISSN: 2962-4444, en
16	Azmy et., (2019) "Effect Of Good Corporate Governance On Company Profitability RE&Property Sector In Indonesia".	• Variabel X: Dewan direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit	• Variabel Return Assets Return Equity • Tempat Penelitian • Periode Penelitian	Y: dan on	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Dewan Direksi dan Komite Audit berpengaruh positif signifikan terhadap Return On Assets dan Return On Equity. Sedangkan Dewan Komisaris tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA dan ROE	Jurnal Akuntol Volume XXIII, No. 01, January 2019: 18-33.
17	Rizki et al., (2021). "Pengaruh	• Variabel X: Dewan direksi	• Variabel Dewan	X:	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan	E-Jurnal Manajemen,

	<i>Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2014-2018</i> ".	Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional	Komisaris Independen	direksi dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh pada kinerja keuangan, sedangkan dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit eksternal tidak memiliki pengaruh pada kinerja keuangan.	Vol. 10, No. 3, 2021 : 290-312 ISSN : 2302-8912
18	Margaret, E., & Daljono. (2023) "Pengaruh <i>Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021)</i> "	• Variabel Dewan komisaris, dewan direksi, komite audit dan Kepemilikan Institusional	X: • Variabel Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan peperintah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan direksi dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap <i>Return On Assets</i> . Sedangkan dewann komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan pemerintah berpengaruh negative terhadap <i>return on assets</i> .	Journal Of Accounting Volume 12, Nomor 4, Tahun 2023, Halaman 1-14 ISSN (Online): 2337-3806
19	Anandamaya, L. P. V. (n.d.). (2021) tentang "Pengaruh <i>Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Laverange Terhadap Kinerja Keuangan</i> "	• Variabel Dewan Komisaris, Komite Audit	X: • Variabel Dewan Komisaris Independen, Ukuran Presusahaan. Dan Leverage	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, variabel komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan serta variabel leverage berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.	Jurnal Riset Akuntansi e-ISSN: 2460-0585
20	Yuliyanti dan Cahyonowati, (2023) "Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan	• Variabel Dewan Direksi, Kepemilikan Institusional dan komite audit	X: • Variabel Dewan Komisaris Independen, • Tempat Penelitian	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional tidak di temukan pengaruh yang	<i>Diponegoro journal of accounting</i> Volume12, nomor 3, tahun 2023, halaman 1-4 ISSN (Online): 2337-3806

Manajerial, Dan
Kepemilikan
Institusional
Terhadap Kinerja
Keuangan” Pada
Perusahaan
Manufaktur yang
Terdaftar Di BEI
2018-2021

sugnifikan terhadap
kinerja keuangan

2.2 Kerangka Pemikiran

Di era globalisasi dan persaingan bisnis semakin ketat, perusahaan dituntut untuk terus meningkatkan kinerja keuangannya agar mampu bersaing dengan perusahaan lain. Tetapi hal tersebut juga tidak hanya fokus pada pencapaian kinerja keuangan tetapi juga pada pengelolaan perusahaan yang baik melalui penerapan prinsip prinsip *Good Corpotrate Governance* (Pramanaswari, 2024). *Good Corpotrate Governance* (GCG) adalah seperangkat aturan praktik, dan proses yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan transparasi, akuntabilitas, dan keadilan dalam operasionl perusahaan.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut penelitian ini didukung oleh teori keagenan yang menjelaskan hubungan antara *agent* dan *principal* yaitu manajer dan pemilik (Jensen & Meckling, 1976). *Agency Theory* memaparkan keterkaitan antara prinsipal yakni pemegang saham dan agen yaitu manajer yang ada di perusahaan (Pitaloka, 2024). Secara umum, terdapat potensi terjadinya konflik antara keputusan agen dan keputusan prinsipal yang bertujuan untuk menyejahterakan prinsipal. Menurut Warrad & Khaddam (2019), pada saat terjadi

pertentangan kepentingan, maka biaya agensi atau *agency cost* akan meningkat. Berdasarkan *Agency Theory*, apabila *Agency Cost* dapat diminimalkan maka kinerja keuangan perusahaan memiliki peluang untuk meningkat (Kyere & Ausloos, 2020). Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) bisa mengurangi perselisihan antara prinsipal dan agen melalui pengaturan pengawasan yang efektif. Mekanisme ini memastikan bahwa tindakan manajemen sejalan dengan keinginan para prinsipal (Jensen & Meckling, 1976).

Good Corporate Governance dan kinerja keuangan memiliki hubungan yang erat dalam konteks manajemen perusahaan. Praktik-praktik *Good Corporate Governance* yang efektif seperti transparansi dalam pelaporan keuangan, pengelolaan risiko yang baik dan struktur pengambilan keputusan yang adil, dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja keuangan (Pramanaswari, 2024). Pramanaswari, (2024) juga mengatakan bahwa Implementasi *Good Corporate Governance* yang kuat dapat menjadi faktor penting dalam mencapai kinerja keuangan yang berkelanjutan dan memastikan pertumbuhan jangka panjang perusahaan.

Teori Agensi mengasumsikan bahwa prinsipal dan agen memiliki kepentingan yang berbeda. Teori Agensi menyebutkan bahwa agen akan berperilaku *self-interest* (mementingkan dirinya) yang mungkin akan bertentangan dengan kepentingan prinsipal (Ghozali, 2020:86). Agen selaku pengelola perusahaan dapat melakukan tindak manipulasi keuangan. Tindak manipulasi keuangan yang dilakukan agen dapat merugikan perusahaan. Maka dari itu, perbedaan kepentingan agen dan prinsipal mampu memberikan pengaruh terhadap

Kinerja Keuangan perusahaan (Angelica, 2021). Keadaan tersebut membutuhkan struktur mekanisme *Good Corporate Governance*. Upaya untuk mewujudkannya yaitu dengan membentuk Dewan Komisaris, Komite Audit dan Kepemilikan Institusional.

Dewan Komisaris adalah sekelompok individu yang ditunjukkan oleh pemegang saham untuk mengawasi manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan strategi (Haryani dan Susilawati, 2023). Berdasarkan teori keagenan adanya asimetri informasi antara manajemen sebagai agen dan pemilik atau pemegang saham sebagai principal memerlukan adanya pengawasan yang ketat (Yunina dan Nisa, 2020). Dengan demikian, untuk mengurangi konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* dapat dilakukan dengan cara memperbanyak proporsi dewan komisaris dalam suatu perusahaan yang memiliki peran sebagai mediator. Berdasarkan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 Pasal 20, jumlah anggota Dewan Komisaris dalam perusahaan publik sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang, dan jika hanya terdapat dua orang, maka salah satunya wajib merupakan Komisaris Independen. Dari perspektif teori agensi, dewan komisaris berperan sebagai mekanisme pengawasan internal yang utama untuk mengendalikan perilaku oportunistik manajemen sehingga dapat menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan manajer. Penelitian mengenai pengaruh dewan komisaris terhadap kinerja keuangan memiliki hasil yang beragam seperti penelitian yang dilakukan oleh Febriana dan Sri, (2022), mengatakan bahwa dewan komisaris berdampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Namun, berbeda dengan hasil

penelitian yang dilakukan oleh Ridiwantoro, (2022) yang menunjukkan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

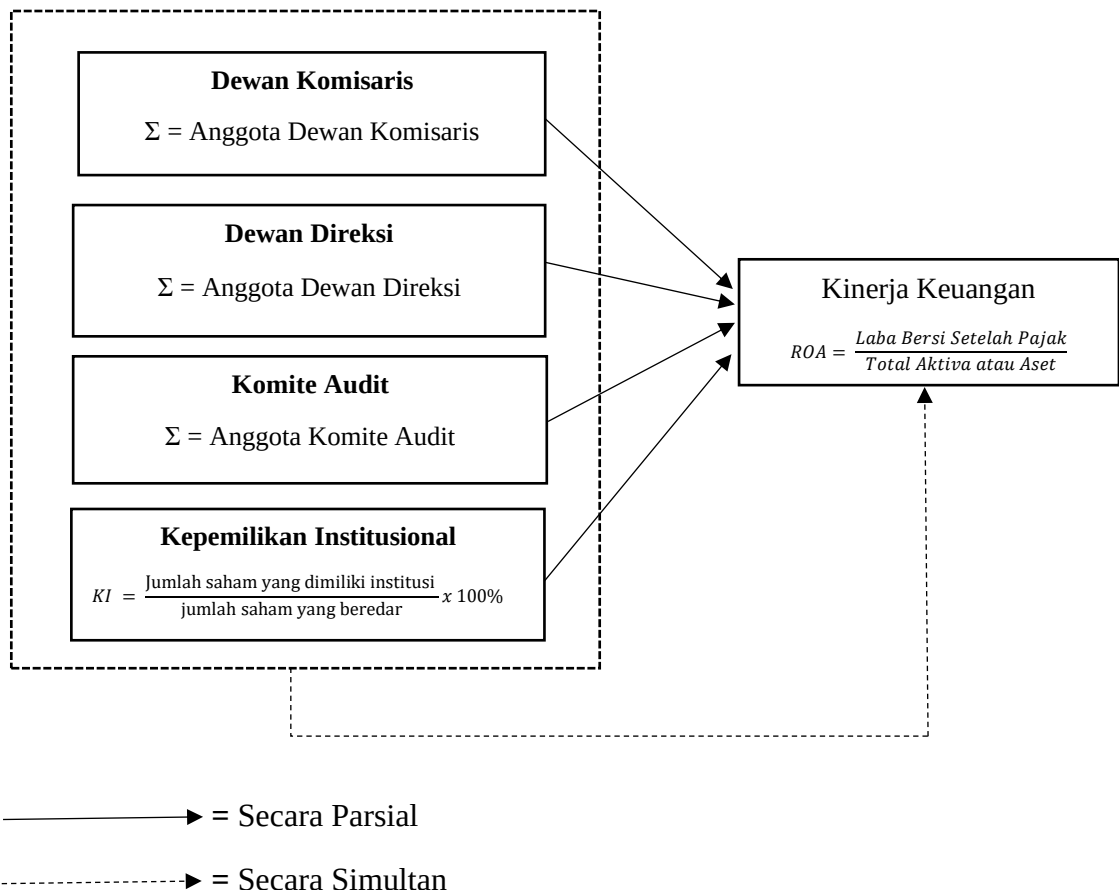
Manajemen atau dewan direksi menurut teori agensi ialah agen bagi *stakeholder*. Dewan direksi bertugas menjadi penentu kebijakan perusahaan baik dalam jangka Panjang atau pendek, serta bertanggung jawab atas perkembangan perusahaan. Keberadaan dewan direksi juga mampu memperkecil kemungkinan terjadinya permasalahan agensi dalam perusahaan. Selain itu, dewan direksi menjadi perwakilan perusahaan di dalam atau luar perusahaan. Dewan direksi memiliki peran sebagai penanggung jawab perusahaan, semakin besar jumlah dewan direksi maka koordinasi dan komunikasi akan cenderung lebih mudah dilakukan, sehingga kinerja keuangan perusahaan akan meningkat (Febriana dan Sri, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Yulianti dan Cahyonowati, 2020 menunjukkan bahwa dewan direksi tidak ditemukan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Margaret dan Daljono, 2023 menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.

Selain itu, Komite Audit mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *Good Corporate Governance*. Dengan berjalannya fungsi Komite Audit secara efektif, maka kontrol terhadap perusahaan akan lebih baik sehingga, konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri dapat diminimalisasi (Febrina dan Sri,

2022). Margaret dan Daljono, 2023 menjelaskan bahwa jika jumlah komite audit dalam sebuah perusahaan semakin banyak, tingkat pengawasan pada manajemen akan menjadi lebih ketat dibandingkan dengan jika perusahaan memiliki komite audit yang terlalu sedikit karena terdapat kekurangan pada keterampilan dan pengetahuan dengan jumlah komite audit yang semakin banyak, maka ektivitas komite audit semakin meningkat dan kinerja keuangan juga akan semakin meningkat sehingga dapat mengurangi kegiatan seperti *earnings management* yang dapat berdampak pada kualitas dan kredibilitas pelaporan keuangan yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Teori keagenan telah memberikan gambaran bahwa banyaknya komite tersebut dianggap dapat memberi pengawasan manajemen yang baik, sehingga meminimalisir *agency cost* dan meningkatkan kinerja perusahaan (Yulianti dan Cahyonowati, 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Sari et al. (2022), kinerja keuangan tidak dipengaruhi secara signifikan oleh komite audit. Karena komite audit merupakan persyaratan bagi semua perusahaan, ukurannya tidak berpengaruh pada kinerja keuangan. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Febriana dan Sri (2022) menyimpulkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Kepemilikan institusional dapat mempengaruhi kinerja keuangan karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional, akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal (Fitriyani dan Komala, 2024). Hal ini sejalan dengan teori keagenan yang membangun hubungan antara kepemilikan institusional dan kinerja keuangan perusahaan. Secara khusus, pemilik institusional mengawasi semua perilaku manajemen dan membuat keputusan atas bisnis, dengan

tujuan memastikan bahwa tindakan ini optimal untuk kinerja perusahaan (Shevira, 2023). Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Lestari, (2024) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Partiwi dan Herawati, (2022) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Berikut penulis sajikan kerangka pemikiran mengenai Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit dan Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan.



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2018:63) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan uraian tinjauan teoritis dan kerangka berpikir, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2023
2. Dewan Direksi secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2023
3. Komite Audit secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2023
4. Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2023
5. Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit dan Kepemilikan Manajerial secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2020